



Analisis Permasalahan dan Solusi Strategis Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Analysis of Problems and Strategic Solutions for the Development of the Red and White Village Cooperative

**Annisa Handayani^{1*}, Fidia Wati², Salma Diani³, Tia Handani⁴, Nasrullah Hidayat⁵,
Khairani Alawiyah Matondang⁶**

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : annisahandayanis60@gmail.com^{1*}, vidiawati304@gmail.com², salmadianisiregar05@gmail.com⁴,
tiahndn30@gmail.com⁵, nasrullah@unimed.ac.id⁶, alawiyah@unimed.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 01-06-2026

Revised : 03-06-2026

Accepted : 05-06-2026

Published : 07-06-2026

Abstract

The Merah Putih Village Cooperative (KDMP) is a strategic government program aimed at strengthening the village economy through managing local potential based on the principles of mutual cooperation, togetherness, and community empowerment. However, in its development process, KDMP still faces various challenges that can hinder the effectiveness and sustainability of the cooperative. This study aims to analyze various problems faced in the development of the Merah Putih Village Cooperative and formulate strategic solutions that can be implemented to support its sustainability. The study uses a qualitative approach with a descriptive research type through library research methods. The data used are secondary data obtained from scientific journals, books, academic articles, government policy documents, and various relevant references regarding cooperatives and the Merah Putih Village Cooperative. The results of the study indicate that the main problems faced by KDMP include weak governance and transparency of the cooperative, high dependence on government support, and the low quality of human resources (HR) in cooperative management. To overcome these problems, strategic solutions are needed in the form of strengthening institutional governance and transparency, increasing human resource capacity through continuous training and mentoring, implementing digitalization of cooperative management and services, and strengthening business independence through strategic partnerships based on local potential. By implementing this strategy sustainably, the Merah Putih Village Cooperative is expected to be able to develop into an independent, professional, and competitive cooperative in supporting the improvement of community welfare and village economic development.

Keywords: *Red and White Village Cooperative, cooperative development, cooperative governance.*

Abstrak

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal berbasis prinsip gotong royong, kebersamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam proses pengembangannya, KDMP masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan guna mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data yang



digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta berbagai referensi yang relevan mengenai koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi KDMP meliputi lemahnya tata kelola dan transparansi koperasi, tingginya ketergantungan terhadap dukungan pemerintah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi strategis berupa penguatan tata kelola dan transparansi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, penerapan digitalisasi pengelolaan dan layanan koperasi, serta penguatan kemandirian usaha melalui kemitraan strategis berbasis potensi lokal. Dengan penerapan strategi tersebut secara berkelanjutan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu berkembang menjadi koperasi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi desa.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan koperasi, tata kelola koperasi.

PENDAHULUAN

Koperasi pada hakikatnya dibentuk sebagai wadah kerja sama ekonomi yang berlandaskan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Kehadiran koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Berbeda dengan badan usaha yang semata-mata mengejar keuntungan, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan (Hidayat, 2021). Tujuan utama koperasi adalah menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sehingga setiap anggota memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui prinsip kebersamaan tersebut, koperasi diharapkan mampu memperkuat posisi ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal maupun akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial yang berperan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar utama perekonomian rakyat. Koperasi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan usaha yang dijalankan, koperasi mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering kali muncul akibat ketimpangan penguasaan sumber daya. Keberadaan koperasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal (Abadi, 2021). Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Urgensi koperasi dalam perekonomian semakin terlihat ketika masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Koperasi dianggap mampu menjadi suatu mekanisme yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara bersama-sama. Dalam kondisi tertentu, koperasi dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pembiayaan, pemasaran, maupun kebutuhan konsumsi yang sulit dijangkau secara individual (Praonco, 2021). Peran tersebut menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing masyarakat. Selain itu,



koperasi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh sebab itu, penguatan koperasi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dipandang sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang paling mencerminkan nilai-nilai tersebut karena mengedepankan partisipasi, kesetaraan, dan kebersamaan. Dalam praktiknya, koperasi mampu menjadi jembatan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Melalui pengelolaan yang demokratis, setiap anggota memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usaha koperasi melalui rapat anggota yang dilaksanakan (Rosdaliva et al., 2023). Kondisi ini menciptakan rasa memiliki yang kuat sehingga mendorong anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga sarana pendidikan demokrasi ekonomi bagi masyarakat.

Melihat besarnya peran koperasi tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat kelembagaan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dirancang sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kelembagaan koperasi. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi lokal yang dimiliki desa. Melalui program tersebut, pemerintah berusaha menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Dengan kata lain, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan keberlanjutan operasionalnya. Sebagai lembaga ekonomi yang melibatkan banyak pihak, koperasi memerlukan sistem tata kelola yang baik agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Pengelolaan yang profesional menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan. Kualitas kelembagaan yang kuat akan menentukan kemampuan koperasi dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang muncul dalam proses pengembangannya. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pembentukan koperasi tersebut.

Dalam implementasinya, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya yang berbeda sehingga memengaruhi proses pengelolaan koperasi. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak selalu berjalan dengan pola yang sama di setiap wilayah. Berbagai tantangan dan hambatan dapat muncul dalam proses pembentukan, pengelolaan, maupun pengembangan usaha koperasi. Kondisi ini merupakan hal yang seringkali terjadi mengingat skala program yang sangat luas dan melibatkan banyak pemangku



kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius agar koperasi dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa, berbagai tantangan yang muncul perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai analisis permasalahan dan solusi strategis pengembangan Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji. Topik ini relevan karena berkaitan dengan upaya penguatan ekonomi masyarakat desa melalui instrumen koperasi. Selain itu, keberhasilan program ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, pembahasan mengenai solusi strategis akan menjadi bagian penting untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mendukung keberlanjutan dan efektivitas koperasi. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan solusi strategis pengembangan Koperasi Desa Merah Putih layak menjadi fokus kajian guna mendukung terwujudnya koperasi yang kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan guna mendukung keberlanjutan koperasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) karena pembahasan penelitian berfokus pada analisis konseptual yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam terkait berbagai tantangan dalam pengembangan koperasi desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan peraturan terkait perkoperasian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi strategis pengembangan Koperasi Desa Merah Putih secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi

Koperasi merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Perjalanan perkembangan koperasi dapat ditelusuri melalui tiga jalur utama. Pertama, koperasi tumbuh atas dorongan organisasi sosial maupun politik. Kedua, perkembangan koperasi didukung dan difasilitasi oleh pemerintah. Ketiga, koperasi lahir dari inisiatif individu atau kelompok masyarakat yang memiliki tujuan ekonomi bersama (Yuvanda & Rachmad, 2021).



Secara etimologis, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *cum* yang berarti “bersama” dan *operari* yang berarti “bekerja”. Kedua kata tersebut kemudian berkembang menjadi istilah *co-operation* dalam bahasa Inggris yang bermakna kerja sama. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *coöperatieve vereniging*, yang merujuk pada suatu perkumpulan yang dibentuk untuk bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992) Pasal 5 ayat (1) dan (2), koperasi di Indonesia menjalankan beberapa prinsip sebagai landasan dalam kegiatan organisasi dan usahanya.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi anggota tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang tertentu. Keanggotaan didasarkan atas kemauan sendiri, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam proses bergabung maupun keluar dari koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengambilan keputusan dalam koperasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, terutama dalam rapat anggota. Pengelolaan koperasi mencerminkan kepentingan bersama guna mencapai kesejahteraan anggota.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai partisipasi anggota

Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota berdasarkan tingkat kontribusi atau partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Anggota yang lebih aktif dalam memanfaatkan dan mendukung usaha koperasi berhak memperoleh bagian SHU yang lebih besar dibandingkan anggota yang kurang aktif.

4. Pemberian balas jasa terhadap modal secara terbatas

Imbal hasil atas modal yang ditanamkan anggota tidak menjadi tujuan utama koperasi. Besarnya balas jasa diberikan secara terbatas dan lebih mempertimbangkan aktivitas ekonomi anggota dengan koperasi daripada sistem bunga sebagaimana berlaku pada lembaga keuangan lainnya.

5. Kemandirian

Koperasi harus mampu menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya secara mandiri. Pengelolaan koperasi dilakukan tanpa campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan maupun tata kelola organisasi.

6. Pendidikan perkoperasian

Koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran anggota mengenai nilai-nilai serta praktik perkoperasian.



7. Kerja sama antarkoperasi

Koperasi didorong untuk membangun kemitraan dan kolaborasi dengan koperasi lainnya. Kerja sama tersebut dapat memperkuat kapasitas usaha, memperluas jaringan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program yang dikembangkan pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi desa melalui pendekatan koperasi yang berlandaskan asas gotong royong dan kebersamaan masyarakat. KDMP dibentuk sebagai wadah ekonomi kolektif yang memungkinkan masyarakat desa menghimpun dan mengelola berbagai potensi yang dimiliki secara bersama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini diarahkan untuk menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat desa serta pengembangan potensi lokal yang tersedia (Saputri et al., 2025). Sejalan dengan itu, KDMP juga dipandang sebagai program strategis yang mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai fondasi pembangunan dari tingkat lokal (Mufid & Ardianti, 2025).

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keanggotaan, KDMP tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pengelola dan pengambil keputusan dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu, proses pembentukan KDMP dilakukan melalui keterlibatan masyarakat desa, mulai dari sosialisasi, musyawarah, pembentukan kepengurusan, hingga legalisasi badan hukum koperasi. Partisipasi masyarakat, musyawarah, dan nilai gotong royong menjadi unsur penting dalam proses pembentukan KDMP (Pakabu et al., 2025). Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan mampu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan organisasi.

Keberadaan KDMP diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas akses ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan potensi desa secara lebih terorganisir. Dalam perspektif pembangunan desa, KDMP dipandang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, penyediaan akses ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan desa melalui penguatan kelembagaan lokal dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Saputri et al., 2025). Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya, melainkan sangat bergantung pada kapasitas pengelola, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi. Oleh karena itu, meskipun memiliki tujuan yang strategis, KDMP masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi koperasi

Meskipun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai instrument strategis untuk memperkuat perekonomian desa, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan tersebut. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan pada KDMP, berkaitan dengan aspek tata kelola dan transparansi pengelolaan koperasi. Keberhasilan suatu koperasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus dan manajemen organisasi. Lemahnya transparansi saat ini masih menjadi sorotan untuk KDMP pasalnya jika transparansi lemah akan berpotensi penyalahgunaan dana



koperasi terutama apabila pengurus memiliki kedekatan hubungan kekerabatan dengan perangkat desa. Kondisi ini dapat memunculkan konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan (Suyitno et al., 2025). Apabila laporan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan dana tidak disampaikan secara terbuka kepada anggota maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan menurun. Dalam jangka panjang akan mengurangi partisipasi anggota dan menghambat perkembangan usaha yang dijalankan.

Tantangan lain yang cukup krusial adalah tingginya risiko ketergantungan koperasi terhadap dukungan pemerintah. Sebagian besar koperasi Merah Putih sangat bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah, baik melalui APBN, APBD, maupun APBDes. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan program yang diinisiasi dari atas (*top-down*) melalui kebijakan pemerintah. Model pengembangan seperti ini memiliki kelebihan karena mampu mempercepat pembentukan kelembagaan koperasi dalam jumlah besar. Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut juga menyimpan risiko berupa rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat apabila partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan pembentukan koperasi tidak optimal. Koperasi yang lahir lebih karena dorongan program pemerintah daripada kebutuhan nyata masyarakat berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Ketergantungan ini dapat terlihat dari dua aspek utama. Pertama, ketergantungan finansial, yaitu kondisi ketika koperasi hanya mampu beroperasi selama masih memperoleh bantuan modal, subsidi, atau dukungan anggaran dari pemerintah. Ketika bantuan tersebut berkurang atau dihentikan, koperasi menghadapi kesulitan untuk membiayai operasional dan mengembangkan usaha secara mandiri. Kedua, ketergantungan kelembagaan, yaitu keadaan ketika koperasi terlalu bergantung pada pembinaan, pendampingan, dan arahan pemerintah. Apabila intensitas pendampingan menurun karena perubahan prioritas kebijakan atau keterbatasan sumber daya pemerintah, maka kapasitas koperasi untuk mengelola organisasi dan usahanya secara mandiri juga akan melemah (Afgani & Wanusmawatie, 2025).

Permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi. Selama ini masih terdapat anggapan bahwa koperasi dapat dijalankan oleh individu dengan kemampuan manajerial yang sederhana karena sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil. Pandangan tersebut sebenarnya kurang tepat karena kompleksitas pengelolaan koperasi justru menuntut kompetensi yang lebih luas dibandingkan pengelolaan usaha biasa. Pengurus dan pengelola koperasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan operasional organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator, pendamping, konsultan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para anggota (Abadi, 2021). Mereka dituntut memiliki kemampuan dalam bidang manajemen keuangan, perencanaan usaha, pemasaran, pengelolaan risiko, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan jaringan kemitraan.

Di samping itu, pengurus koperasi juga perlu memahami karakteristik usaha anggota sehingga mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rendahnya kualitas SDM dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya perencanaan bisnis, kurang optimalnya pengelolaan keuangan, rendahnya kemampuan membaca peluang pasar, serta minimnya inovasi dalam pengembangan usaha koperasi. Akibatnya, koperasi akan sulit bersaing dengan badan usaha lain yang memiliki manajemen lebih profesional. Dalam era digital saat ini, tantangan tersebut semakin besar karena koperasi juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen (Abadi, 2021). Oleh karena



itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Solusi yang dapat dilakukan

Berbagai masalah yang masih dihadapi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya mampu mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga memperkuat kapasitas koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat desa. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Koperasi

Permasalahan tata kelola menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Purnamasari et al (2025) menjelaskan bahwa sebagai koperasi yang masih tergolong baru, KDMP memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan strategi percepatan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai tujuan dan prinsip koperasi. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pengelola koperasi menunjukkan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Purnamasari et al., 2025). Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kelembagaan yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan koperasi di tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola KDMP yang efektif (Saputri et al., 2025).

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendampingan Berkelanjutan

Kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan KDMP. Hasil penelitian Shanty et al (2025) menunjukkan bahwa koperasi yang menerapkan pelatihan manajerial, digitalisasi sistem keuangan, dan kemitraan lokal mengalami peningkatan efektivitas operasional, partisipasi anggota, serta ketahanan ekonomi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kapasitas manajerial yang kuat berperan dalam membangun koperasi yang adaptif, partisipatif, dan berdaya saing di tingkat lokal. Di sisi lain, Wahyuni et al (2025) merekomendasikan penguatan dan pengembangan kompetensi pengurus sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus perlu dilakukan secara berkelanjutan agar koperasi mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

3. Digitalisasi Pengelolaan dan Layanan Koperasi

Digitalisasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KDMP. Penerapan sistem informasi berbasis web mampu mempercepat akses informasi, memperkuat fungsi layanan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi desa. Hasil kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem digital yang diterapkan memberikan dampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan dan partisipasi komunitas (Pakaya et al., 2025). Pelatihan digitalisasi bagi pengurus Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan kompetensi teknis pengurus secara signifikan. Penelitian tersebut



menyimpulkan bahwa transformasi digital koperasi dapat dipercepat melalui pelatihan yang partisipatif dan pemanfaatan teknologi yang ramah pengguna (Refianto, 2026).

4. Penguatan Kemandirian Usaha dan Kemitraan Strategis

Penguatan kemandirian usaha perlu menjadi perhatian dalam pengembangan KDMP agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Pembentukan KDMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha secara kolektif dan pemberdayaan masyarakat desa., partisipasi masyarakat, musyawarah, dan pemanfaatan potensi lokal menjadi unsur penting dalam pembentukan serta pengembangan koperasi (Pakabu et al., 2025). Selain itu, koperasi yang menjalin kemitraan lokal menunjukkan peningkatan efektivitas operasional dan ketahanan ekonomi (Shanty et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan usaha berbasis potensi lokal yang didukung kemitraan strategis dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat keberlanjutan KDMP.

Secara keseluruhan, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pengelolaan, serta pengembangan usaha dan kemitraan strategis merupakan langkah yang dapat mendukung keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih. Penerapan berbagai upaya tersebut secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi wadah ekonomi kolektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara bersama. Namun, dalam proses pengembangannya, KDMP masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya tata kelola dan transparansi, tingginya ketergantungan terhadap dukungan pemerintah, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi. Permasalahan tersebut dapat menghambat efektivitas pengelolaan koperasi dan keberlanjutan usaha apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis untuk mendukung keberhasilan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, antara lain melalui penguatan tata kelola dan transparansi koperasi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, penerapan digitalisasi pengelolaan koperasi, serta penguatan kemandirian usaha dan kemitraan strategis berbasis potensi lokal. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu berkembang menjadi koperasi yang mandiri, profesional, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).



- Hidayat, S. (2021). *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK PENGUATAN USAHA SIMPAN PINJAM DI DESA SRANAK. *Journal of Research Applications in Community Services*, 4(3), 101–108.
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih : Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 287–292.
- Pakaya, R., Idris, N. O., & Pontooyo, F. (2025). Digitalisasi Koperasi Merah Putih dan Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Meningkatkan Partisipasi Program Keluarga Berkualitas di Desa Tiohu. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 294–303.
- PraPONCO, E. (2021). *Ekonomi Koperasi*. Yayasan Cipta Widya Karya.
- Purnamasari, P., Putri, F. B., Apriani, E., & Latif, A. (2025). Sosialisasi Percepatan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Cibitung. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 759–764.
- Refianto, E. (2026). Peningkatan Kompetensi Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melalui Pelatihan Inovasi Digital di Kota Blitar. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 765–774. <https://doi.org/10.60004/komunita.v5i2.639>
- Rosdaliva, M., Ambulani, N., Alfiannya, S., Octavia, R. A., Suarbawa, I. W., Bibiana, R. P., Terimajaya, I. W., Wardani, M. K., Wafik, A. Z., & Kusuma, B. A. (2023). *Ekonomi Koperasi (Potensi dan Praktik Terbaik)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
- Shanty, A. M. M., Makhrani, & Batubara, S. (2025). Penguatan Kapasitas Manajerial Koperasi Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia*, 3(3), 318–322.
- Suyitno, Rokhimah, & Faizah, E. N. (2025). Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih: Kajian Persepsi Masyarakat di Youtube. *Jurnal Manajerial*, 12(03), 498–525. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v12i03.9994>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).
- Wahyuni, T., Kusumaningrum, M., & Nurisma, D. (2025). Refleksi Koperasi Merah Putih : Sebuah Upaya Mengakselerasi Asa. *POLICY BRIEF*.
- Yuvanda, S., & Rachmad. (2021). *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.